

RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

Jl. Pahlawan No. 22 B Telp.0343 Pasuruan 67117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

NOMOR : 090 / 39.7 / 423.040 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023, serta guna efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan tahun 2011 Nomor06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daaerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 32); dan
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, terikat oleh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mempersiapkan, menyusun Rencana Kerja Tahun 2023;
2. Mengukur dan mengevaluasi program kegiatan tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Kota Pasuruan



[Handwritten Signature]
DYAH ERMITASARI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19721105 199803 2 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 090 / 39.7 / 423.040 / 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	PENAGGUNGJAWAB	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
2	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
3	KETUA I	Kepala Bidang Perumahan
4	KETUA II	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
5	ANGGOTA	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan. d. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman e. Kepala UPT Rusunawa f. Kepala UPT Pemakaman

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN**



DYAH ERMITASARI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP.19721105 199803 1 012



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN
Alamat, Jl. Pahlawan No. 22 B Telp. 0343
Pasuruan 67117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
NOMOR: 188.4 / / 423.109 / 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2023

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 2011 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Perubahan Tahun 2011; dan

20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Memerintahkan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA kegiatan tahun berkenaan.
- KETIGA :** Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan


DYAH ERMITASARI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19721105 199803 2 012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan target-target yang rencananya akan dicapai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan transparan.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas selama setahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien.

Pasuruan,

2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN



DYAH ERMITASARI, ST, MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721105 199803 2 012

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALIKOTA	
KEPUTUSAN KEPALA PD	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
 TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
 DAERAH	66
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kegiatan RKPD 2023	66
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Pasuruan	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Pasuruan	30
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Pasuruan	34
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pasuruan	45
Tabel 3.1	Tabel Pemetaan sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kota Pasuruan	56
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Pasuruan	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan bahan bagi penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang mana di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah, serta memperhatikan Renja K/L terkait dan Renja Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dialokasikan anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan prioritas.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan fisik-prasarana, serta penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta

pelayanan administrasi di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. **Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Perubahan Tahun 20...; dan**
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

13 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2023 bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama kurun waktu satu tahun serta sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, pemakaman dan rumah susun umum/khusus di Kota Pasuruan pada tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini adalah:

1. Sebagai pengendali dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;
4. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

14 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan kegiatan RKPD 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek dari evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2021 serta tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

21 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam bab ini evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program-kegiatan Urusan Perumahan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2021, dan perkiraan capaian program-kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun berjalan (2022). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun berikutnya.

Secara umum hampir semua program atau kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 dapat tercapai target kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun 2022. Namun tidak berarti tanpa ada kekurangan dalam pencapaian targetnya.

Disamping itu, terjadinya pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 juga turut mempengaruhi perubahan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian besar anggaran untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 dialihkan untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Pasuruan. Akibatnya sebagian besar kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berupa pekerjaan konstruksi tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan, yakni melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat, penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan.

Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan Urusan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2021 sesuai dengan Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 yang mengacu pada APBD 2021 dan Renstra Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat diukur dari indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan perhitungan membandingkan antara jumlah rumah tangga yang diukur dengan Kartu Keluarga (KK) yaitu sebesar 63.929 KK dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman. Adapun sampai dengan tahun 2021, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 55.931 KK atau sebesar 87,49 persen.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang mana telah dianggarkan untuk sambungan rumah sebanyak 100 Sambungan Rumah namun hanya terealisasi sebesar 75,33 persen dengan 40 Sambungan Rumah dari pagu anggaran yang tersedia. Hal ini dikarenakan adanya data SR yang sama dengan Program Air Minum (PDAM) dari Pusat.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2021 yakni sejumlah 6 program 13 kegiatan. Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut rata-rata serapan anggaranannya di atas 80%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berusaha semaksimal mungkin dalam penyerapan anggaran tidak melampai/melebihi target yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja pegawai.
4. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah faktor sosio

demografi masyarakat, berupa respon yang positif maupun negatif pada saat pelaksanaan kegiatan di lokasi yang telah direncanakan. Faktor berikutnya yaitu jangka waktu pengadaan barang/jasa, yang mempengaruhi ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan. Adanya perubahan harga satuan dan lokasi pembangunan di beberapa paket pekerjaan, ketersediaan bahan maupun SDM dari pelaksana kegiatan juga turut berperan untuk mencapai target yang diinginkan, serta hasil perencanaan kegiatan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan.

5. Implikasi yang dapat ditimbulkan apabila tidak adanya pembenahan terhadap faktor di atas yaitu mulai dari tidak tercapainya mutu kegiatan sampai dengan keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan. Itu semua mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan.
6. Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan. Kebijakan berupa melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat, penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	97.90 %		91.64%	76%	82.93%	93.21 %	76%	77.63%
1 3 3 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun	500 SR							

1	3	3	2.01	3	Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun	11043 5 m'					17963 m'	17963 m'	16.27%
					Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	Liter/ Detik							
					Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun	30935 m'	1205 m ²	2264 m ²	187.88 %	2264 m ²	2264 m ²	2264 m ²	7.32%
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipedaan di Kawasan Perkotaan	500 SR							
					Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipedaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu								
					Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2021)	79500 m'	100 SR	69 SR	69%	69 SR	69 SR	69 SR	
					Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)						17963 m'	17963 m'	22.59%

1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	93.27 %		90.15%	165%	183.03 %	90.93%	165%	176.91%
1 3 5 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Septictank yang Terbangun	2175 SR					435 SR	435 SR	20%
1 3 5 2.01 3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1875 Rumah Tangga							
		Jumlah Septictank yang Terbangun	3835 SR		485 SR	418 SR	86.19%	185 SR	603 SR	15.72%
		Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 Kk)	250 Unit		19 Unit	19 Unit	100%	50 Unit	69 Unit	27.6%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Musren Prioritas 1)	500 SR							
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Pokir Prioritas 1)	200 SR							

1	3	5	2.01	6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga												
1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok												
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi	475 SR	95 SR	110 SR	115.79 %	50 SR	160 SR	33.68%						
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	180 Unit												
						Jumlah MCK yang Dipelihara	50 MCK	36 MCK	90 MCK	250%	10 MCK	100 MCK	200%						
						Jumlah Rumah/Bangunan Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	6300 m3	1260 m3	25 m3	1.98%	1260 m3	1285 m3	20.40%						

1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	94.92 %		89.22%	269%	301.51 %	90.45%	179.73%	189.35%
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	90 %		89.22%	269%	301.51 %	85%	177%	196.67%
1 3 7 2.01 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman Yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20	Sistem Jaringan						
		Jumlah Lokasi Permukiman Tematik yang Terbangun	10	Lokasi	1 Lokasi	10 Lokasi	1000%	2 Lokasi	12 Lokasi	120%
		Jumlah Luas Jalan dan Jembatan Permukiman yang Dibangun	6485	m2	2748 m2	11084.86 m2	403.38 %	638 m2	11722.86 m2	180.77%
		Jumlah Luas Jalan Permukiman yang Ditingkatkan	16065	m2	1245 m2	8473.5 m2	680.6%	3737 m2	12210.5 m2	76.01%

			Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang Dibangun	14525 m	3125 m	1706.5 m	54.61%	1706.5 m	11.75%
			Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang Ditingkatkan	23025 m	3110 m	2963.8 m	95.3%	9663.8 m	41.97%
			Jumlah Sarpras Pemukiman Umum yang Dibangun	5 TPU	1 TPU	1 TPU	100%	3 TPU	60%
			Jumlah Titik Lokasi PJJ yang Dibangun	1145 Titik	113 Titik	207 Titik	183.19 %	241 Titik	21.05%
1	3	7	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Sistem Jaringan	5051 m2	5157 m2	102.10 %	10073 m2	38.37%
			Jumlah Luas Jalan Lingkungan Permukiman yang Dipelihara	26250 m2	6240 Kotak	3914 Kotak	62.72%	3914 Kotak	12.54%
			Jumlah Makanan Penambah Stamina yang Disediakan	31200 Kotak					

							46250	m		9044	9502	105.06 %	9612	19114	41.33%
			Jumlah Panjang Drainase Lingkungan Permukiman yang Dipelihara	Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman yang Dipelihara	Jumlah TPU yang Dipelihara	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Permukiman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		250 Titik	906 Titik	362.40 %	589 Titik	1495 Titik	89.25%
			Jumlah TPU yang Dipelihara	Jumlah TPU yang Dipelihara	Jumlah TPU yang Dipelihara	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Permukiman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		7 TPU	7 TPU	100.00 %	8 TPU	15 TPU	37.5%
1	3	7	2.01	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		20	Sistem Jaringan							
1	3	7	2.01	4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		20	Dokumen		2	12	600%	2	14	70%
							340	Orang		2	Dokumen		2	Dokumen	

		Jumlah Lokasi yang Dibina	20	Lokasi		34 Lokasi	34 Lokasi	100%	7 Lokasi	41 Lokasi	205%
1 3 10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
1 3 10 2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									
1 3 10 2.01 2		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		m2							
1 4 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%		100%	68%	68%	100%	84%	84%
1 4 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		100%	94%	94%	100%	97%	97%
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu									

1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	Laporan	18 Dokumen	17 Dokumen	94.44%	18 Dokumen	35 Dokumen	38.89%
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Program / Kegiatan	90	Dokumen	18 Dokumen	17 Dokumen	93%	18 Dokumen	35 Dokumen	96.5%
1	4	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100	%	100%	93%	93%	100%	96.5%	96.5%
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	Orang/Bulan						
1	4	1	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Belanja Pegawai	165	Orang	33 Orang	33 Orang	100%	33 Orang	66 Orang	40%

1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	29 Dokumen	22 Dokumen	75.86%	29 Dokumen	51 Dokumen	35.17%
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	145 Dokumen	29 Dokumen	22 Dokumen	75.86%	29 Dokumen	51 Dokumen	35.17%
1	4	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	100%	98%	98%	98%	98%	98%
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen	10 Dokumen	50%
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang PD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen	10 Dokumen	50%
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya	100 %	100%	95%	95%	100%	97.5%	97.5%

1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket														
						Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Meliputi PDH, PDL dan Pakaian Olahraga	40	Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	15 Jenis	23 Jenis	57.5%								
1	4	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30	Dokumen														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	20	Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	35%								
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2400	Orang														
						Jumlah Pembinaan Rohani Aparatur	60	Kali	12 Kali	11 Kali	12 Kali	23 Kali	38.33%									
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	100%	91%	91%	95.5%	95.5%									

1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket													
						Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55	Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%	6 Jenis	17 Jenis	30.91%							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket													
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130	Unit	26 Unit	23 Unit	88.46%	13 Unit	36 Unit	27.69%							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket													
						Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	35	Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	6 Jenis	13 Jenis	37.14%							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180	Dokumen													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

1	4	1	2.06	8		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	180	Exemplar			36 Exemplar	36 Exemplar	66 Exemplar	36.67%
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	Laporan						
						Jumlah Makan dan Minum Rapat	2.300	Kotak		480 Kotak		344 Kotak	344 Kotak	14.96%
						Jumlah Makan dan Minum Rapat						9 Jenis	9 Jenis	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan						
						Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500	Kali		100 Kali		99 Kali	149 Kali	29.8%
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%		100%		100%	100%	100%
1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit						

				Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	40 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	5 Unit	12.5%
1	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100%	92%	92%	100%	96%	96%
1	4	1	2.08	1	5	Laporan						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Lembar		258 Lembar	257 Lembar	99.61%	162 Lembar	419 Lembar	55.87%
1	4	1	2.08	2	60	Laporan						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	Jasa	4	4	100%	4	8	40%
				Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan						
1	4	1	2.08	4	185	Jenis	37	24	64.86%	29	53	28.65%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							

			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	105	Jenis		21 Jenis	21 Jenis	100%	20 Jenis	41 Jenis	39.05%
			Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran	120	Orang		24 Orang	24 Orang	100%	20 Orang	44 Orang	36.67%
1	4	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	75%	75%	75%	100%	87.5%	87.5%
1	4	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Kendaraan						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	250	Liter		38 Liter	76%	240 Liter	278 Liter	111.2%
				Jumlah BBM Operasional Genset								
				Beban Pajak Kendaraan Dinas							29 Unit	
				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	130	Unit		8 Unit	61.54%	18 Unit	26 Unit	20%
1	4	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150	Unit						

1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	75	Kendaraan		15	Kendaraan	13	Kendaraan	86.67%	11	Kendaraan	24	Kendaraan	32%
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225	Unit											
						Jumlah Meja dan Kursi Kantor yang Dipelihara	85	Buah		17	Buah	17	Buah	100%			17	Buah	20%
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	165	Unit		33	Unit				42	Unit	42	Unit	25.45%
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit											
						Konsultan Pengawas Gedung Kantor									1	Paket Pekerjaan	1	Paket Pekerjaan	
						Konsultan Perencana Gedung Kantor									1	Paket Pekerjaan	1	Paket Pekerjaan	
						Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2021)	5	Gedung Kantor		1	Gedung Kantor								
						Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2022)													

		Jumlah Gedung yang Direhab	5	Gedung Kantor		1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100%		1 Gedung Kantor	20%
		Jumlah Pagar yang Direhab	5	Pagar Kantor		1 Pagar Kantor	1 Pagar Kantor	100%		1 Pagar Kantor	20%
1 4 2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	84.07	%		82.51%	100%	121.2%	90%	100%	118.95%
1 4 2 2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	84.07	%		82.51%	100%	121.2%	90%	100%	118.95%
1 4 2 2.05 1		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	15	Laporan							
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (2021)	15	Fasilitasi		3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100%		3 Fasilitasi	20%
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (2022)							3 Rusunawa	3 Rusunawa	

1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	10	Doku men											
						Jumlah Rusunawa yang Dipelihara	15	Rusu nawa		3 Rusuna wa	3 Rusunawa	100%	3 Rusunawa	6 Rusunawa				40%	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	21.65	%		22.08%	108%	489.13 %	90.45%	99.23%				458.34%	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	85	%					85%	85%				100%	
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Doku men											
						Jumlah Lokasi yang Disurvei	20	Loka si					34 Kelurahan	34 Kelurahan					170%
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi	1500	Unit					300 Unit						

1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	1500	Rumah						270 Rumah	270 Rumah	18%
1	4	3	2.03	2	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1350	Unit Rumah								
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	1.500	Rumah		200 Rumah				270 Rumah	270 Rumah	18%
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1350	Laporan								
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi	1.500	Rumah		200 Rumah	258 Rumah	129%		270 Rumah	528 Rumah	35.2%
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	41.65	%		31.65%	98%	309.64 %	34.15%	98%	235.29%	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	90	PSU						18 PSU	18 PSU	20%

1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	25	25	PSU	Dokumen					5	5 PSU	5 PSU	20%
					Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Yang Didata dan Terasilitasi Penyerahannya					5 Perumahan								
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	95	95	Lokasi									
					Jumlah PSU Perumahan yang Dipelihara		60	60	PSU						12 PSU	14 PSU	116.67 %	43.33%
					Jumlah PSU Perumahan yang Ditingkatkan		65	65	PSU						3 PSU	8 PSU	266.67 %	21.54%

22 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada urusan pemerintahan yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021–2026 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2008 dan petunjuk teknis menteri mengenai penyusunan SPM.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- b. SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat
 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;

Berdasarkan indikator kinerja di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standart Nasi onal	I K K	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				202 1	202 2	202 3	202 4	202 1	202 2	202 3	202 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penemuan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√		91. 64	93. 21	93. 21	93. 21	87. 43	87. 43	94. 77	94. 77	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	√		90. 15	90. 93	90. 93	90. 93	88. 04	88. 04	91. 71	91. 71	
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	√		100 13 Uni t	100 35 Uni t	100 35 Uni t	100 35 Uni t	100 9 Uni t	100 9 Uni t	100 10 Uni t	100 10 Uni t	Berdasarkan permohonan rumah terdampak bencana
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√		-	50	50	50			-	-	-
5	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√		87. 95	88. 15	88. 35					
6	Persentase Kawasan Bebas Kumuh		√		97. 55	97. 75	97. 95					
7	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		√	100 13 Uni t	100 35 Uni t	100 35 Uni t	100 35 Uni t	100 9 Uni t	100 9 Uni t	100 10 Uni t	100 10 Uni t	Berdasarkan permohonan rumah terdampak bencana
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		√	-	50	50	50			-	-	-
9	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan			89. 22	89. 22	89. 22	89. 22					Indikator Tujuan (IKU) DPRKP
10	Persentase Rumah Layak Huni			93. 59	93. 59	93. 59	93. 59	97. 02				Indikator Sasaran (IKD)

												DPRKP
11	Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh			76. 43	76. 43	76. 43	76. 43	54. 34				Indikator Sasaran (IKD) DPRKP

23 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan berdasarkan RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2023 dimana arah pembangunan tahun 2023 dititikberatkan pada program-program yang mendukung percepatan pembangunan kota yang indah dan nyaman melalui infrastruktur strategis berkelanjutan yang diprioritaskan pada infrastruktur berkualitas, lingkungan yang ramah, dan resiko bencana berkurang. Hal ini sesuai dengan Norma Pembangunan Kabinet Kerja yang menyebutkan bahwa aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan dalam RPJMD 2021-2026 antara lain:

- a. Kemandirian Ekonomi yang difokuskan pada ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, Sektor Industri dan UMKM bertumbuh serta PAD meningkat.
- b. Infrastruktur Strategis Berkelanjutan yang meliputi:
 - 1) Layanan Infrastruktur Dasar; difokuskan pada sanitasi dan air bersih
 - 2) Layanan Infrastruktur Perhubungan; difokuskan jalan dan jembatan
 - 3) Ruang Terbuka Hijau; difokuskan pada ITL
 - 4) Zero Karbon; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - 5) Kualitas Air; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)
 - 6) Mengurangi Resiko Bencana, difokuskan pada penurunan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBi).
- c. Layanan Dasar dan Sosial yang menitikberatkan pada Kesalehan Sosial meningkat, Akses Pendidikan dan Kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyup-rukun berdampingan, keberpihakan pada perempuan, anak, difabel dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.
- d. Birokrasi yang Dinamis yang diprioritaskan pada Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemerintahan Berbasis Digital, Kepuasan Masyarakat, ASN yang Profesional, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Rasa Aman Penyelenggara Pemerintahan.

Program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sejalan dengan penekanan Lima Tahun Keempat (Periode 2021 – 2025) dari RPJPD Kota Pasuruan 2006 – 2025. Dimana penekanan pembangunan Kota Pasuruan pada periode

2021 – 2025 adalah pemantapan dan keberlanjutan penguatan sarana, daya saing pada pembangunan SDM, serta ekspansi perekonomian berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

Terkait hal ini, prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Pasuruan yaitu infrastruktur dasar dimana pada aspek infrastruktur dasar diprioritaskan pada pemenuhan ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Pasuruan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur dasar diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Pasuruan yang produktif dan memiliki daya saing dengan meningkatkan pembangunan rumah layak huni, pembangunan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi.

Secara umum, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a) Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan atau Pendanaan

Guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan maka perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan alokasi anggaran perangkat daerah melalui alternatif pembiayaan lainnya selain melalui APBD, terutama untuk pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pasuruan, dengan menjajaki kemungkinan pembiayaan melalui program DAK, Dana hibah Provinsi ataupun bantuan keuangan dari Pemerintah daerah lainnya seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adanya keterbatasan anggaran dapat berakibat pada target dan kinerja dan juga mengakibatkan prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.

b) Peraturan

Adanya peraturan UU Cipta Kerja yang mewajibkan adanya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang belum terintegrasi dengan OSS, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses penyerahan PSU Perumahan. Dan juga belum adanya peraturan terkait perumahan-perumahan yang ditinggal pemilikinya.

c) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkendala karena kurang optimalnya koordinasi di lapangan yang mana masih belum dapat bersinergi dari beberapa OPD.

Selain itu, dikarenakan referensi bank untuk pekerjaan konstruksi yang dipergunakan untuk jaminan pemeliharaan memerlukan waktu dalam pengurusannya/penyelesaiannya, sehingga jangka waktu pekerjaan menjadi bertambah.

d) Pelayanan Air Minum yang Kurang Maksimal

Kurang minatnya sambungan rumah untuk air bersih karena pelayanan air minum di Kota Pasuruan yang kurang maksimal, meskipun hingga tahun 2021 jumlah KK yang memiliki akses air minum aman sebanyak 55.931 KK atau sebesar 87,49%.

Meskipun terdapat beberapa permasalahan di atas, namun tidak terlalu berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian Program SDG's. Hanya saja dalam mencapai sasaran dan prioritas nasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum bisa dioptimalkan yang dikarenakan masih kurangnya minat sambungan rumah untuk air bersih meskipun yang sudah memiliki akses air minum aman sebesar 87,49%.

24 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya reviu atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Review dilakukan karena ada perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD dengan rencana program kegiatan pasca Musrenbang RKPD. Untuk itu perlu adanya penyesuaian pada program kegiatan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil penyesuaian tersebut berupa penambahan kebutuhan anggaran, penambahan kegiatan baru serta penghapusan kegiatan.

Adapun perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD 2023 terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, yang mana terdapat penambahan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Lembar dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuha n Dana (Rp.000)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan			47.246.103,424	I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Pasuruan			52.393.338,387	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			28.569.972,234	I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			32.533.194,14	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	94.77 %	1.685.958,9	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	94.77 %	385.007,6	

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang terbangun	100 SR	1.685.958,9	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang terbangun	100 SR	385.007,6
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun			1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun		
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Penambahan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	1.685.958,9	2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	385.007,6
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	91,71 %	3.475.472,58	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	91,71 %	7.395.771,92

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Septictank yang terbangun	375 SR	3.475.472,558	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Septictank yang terbangun	741 SR	7.395.771,92
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	375 Rumah Tangga	2.962.354,82	1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	741 Rumah Tangga	6.154.742,4
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	12 Rumah Tangga	176.906,5	2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	12 Rumah Tangga	562.926,72
3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Pasuruan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Kelompok	71.915,525	3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Pasuruan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Kelompok	146.956,5

4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	441.202,213	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	530.146,3
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	91,95 %	23.408.540,776	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	91,95 %	24.752.414,62
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	85 %	23.408.540,776	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	85,00 %	24.752.414,62
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	19.801.683,2	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	20.457.366,7
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	3.214.297,876	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	3.208.990,3

3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4	314.946	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4	945.335,42
4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	68 Orang	77.613,7	4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	68 Orang	140.722,2
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			18.676.131,190	II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			19.860.144,247
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	6.579.807,511	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	6.596.589,587

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	30.865,5	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	39.937,3
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	30.865,5	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	39.937,3
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	4.310.638,955	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	4.508.962,189
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.216.961,155	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.412.523,289
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 Laporan	93.677,8	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 Laporan	96.438,9

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	188.468	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	159.511,88
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	188.468	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	159.511,88
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	222.078,176	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	113.224,86
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	152.652,9	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	108.599,6
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	9.425,276	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.625,26
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	60.000	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	0

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	418.341,465	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	419.491,6
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.832,565	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.316,3
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	185.133,4	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	185.232,4
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.090,6	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.084,7
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.320,8	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.716
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	24.057,8	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	28.356,2
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	164.906,3	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	164.786
6	Pengadaan Barang	Kota	Persentase	100%	230.000	6	Pengadaan Barang	Kota	Persentase	100%	191.412,3

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasaran	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasaran	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	230.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	191.412,3
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	618.194,082	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	605.331,458
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.598,832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.832,228
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.095,25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	518.999,23
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	561.221,333	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	558.718

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	303.049,985	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	303.180
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	8.085	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	8.385
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	35.086,348	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit	36.380
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	215.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.773
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	90 %	1.494.231,264	6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	100%	1.485.751,76
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	90 %	1.494.231,264	1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	100%	1.485.751,76

1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	32.415,3	1	Fasilitasi Pengelolaan dan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	31.973,5
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.461.815,964	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.453.778,26
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	66.46 %	4.998.344,4	7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	15.11 %	5.538.137,9
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan			1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan		
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	270 Rumah	4.998.344,4	2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	270 Rumah	5.538.137,9

1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	270 Unit Rumah	4.725.000	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	270 Unit Rumah	5.250.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	270 Laporan	273.344,4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	270 Laporan	288.137,9
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	36,65 %	5.603.748,015	8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	36,65 %	6.239.665
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah PSU perumahan yang terbangun dan terpelihara	19 PSU	5.603.748,015	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah PSU perumahan yang terbangun dan terpelihara	19 PSU	6.239.665
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	74.487	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	160.477,1
2	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	19 Lokasi	5.529.261,015	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	19 Lokasi	6.079.187,9

25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses. Untuk kegiatan fisik diperoleh dari musrenbang pada tingkatan kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan terakhir pada musrenbangkot. Demikian juga untuk proses kegiatan non fisik, melalui hasil musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan PD yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Penanaman Pipa 3 Inchi	Kel. Karang		231 m	PDAM
2	Penanaman Pipa 3 Inchi	Dsn. Ngaglik Gadingrejo		939 m	PDAM
3	Penanaman Pipa 3 Inchi	Yos Sudarso		453 m	PDAM
4	Penanaman Pipa 3 Inchi	Panggung		777 m	PDAM
5	Penanaman Pipa 3 Inchi	Jl. Jawa Gg 2,4,6,8,10 & Lajur Tengah		1930 m	PDAM

6	Pemeliharaan IPAL Komunal	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Pohjentrek RT 01, RW 04 Kec Purworejo Kota Pasuruan - Jl. Halmahera Gg 3 RT 3 RW 3, Kel Tambaan Kec Panggungrejo - Jl. Krajan No 1 Gg RT 1, RW 5 Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo - Jl. Krajan No 1. Gg RT 1 RW 5 Randusari, Gadingrejo - Jl. Margo Taruno RT 5, RW 1 Kebon Agung, Gadingrejo - Jl. Imam Bonjol RT 7 RW 4 Bugul Lor, Panggungrejo - PONPES Salafiah Kel. Krampyangan, Kec. Bugul Kidul 		7 Paket	JEMARIS Pasuruan
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Ds Lojok RT 2 & 3 RW 5 Kepel, Bugul Kidul - Kel. Pekuncen, RT 4, RW 2 Panggungrejo - Jl. Martadinata, Ngemplakrejo, Panggungrejo 		3 Paket	JEMARIS Pasuruan
8	Sosialisasi Program 100:0:100 (100 % sanitasi yang baik & layak, 100 % tercukupinya kebutuhan air bersih & layak, 0 % kawasan lingkungan yang kumuh) dan BIMTEK	4 Kecamatan		3 Kelompok	JEMARIS Pasuruan
9	Perlu Penyediaan Tangki Septic	Kelurahan Kepel, Seban, Bakalan		1 Paket	Forum Kota Sehat
10	Pemeliharaan PSU Permukiman (Pintu Gudang, Pengecatan, Paving, dan Perbaikan Jalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Kandang sapi RT 6 RW 2 - Kel. Pekuncen RT 4 RW 7 - Jl. Jawa Gg 2,4,6,8,10 & Lajur tengah 		3 Paket	Forum Kota Sehat
11	Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan Permukiman Kumuh	Bugul Lor Kebonsari Ngemplakrejo Panggungrejo Tambaan Trajeng Gadingrejo		443 Unit	Program Kotaku

12	Kualitas Permukiman Jalan Lingkungan	Kebonsari Ngemplakrejo Panggungrejo Tambahan Trajeng Gadingrejo		3436 m	Program Kotaku
13	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpahan Air & Kualitas Kontruksi Drainase	Bugul Lor Kebonsari Ngemplakrejo Panggungrejo Trajeng Gadingrejo		2743.6 m	Program Kotaku
14	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standart Teknis & Prasarana & Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kebonsari Ngemplakrejo Panggungrejo Tambahan Trajeng Gadingrejo		1004 Unit	Program Kotaku
15	Ketersediaan Akses Aman Air Minum & Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Bugul Lor Kebonsari Ngemplakrejo Panggungrejo Tambahan Trajeng Gadingrejo		1612 Unit	Program Kotaku
16	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panggungrejo		130 m	Program Kotaku
17	Kualitas Kontruksi Drainase	Panggungrejo Mandaranrejo Kandang sapi		275 m	Program Kotaku
18	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Badan/Lembaga Kewaspadaan Masyarakat (B/Lkm)	34 Kelurahan		34 B/LKM	Program Kotaku
19	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kel Pemanfaat & Pemeliharaan (Kpp)	34 Kelurahan		34 Kelompok	Program Kotaku
20	Penyusunan /atau Review derta Legalitas RP2KPKPK	Kota Pasuruan		1 Kegiatan	Program Kotaku
21	Workshop, Rapat Koordinasi, Monitoring & Evaluasi Kegiatan Kotaku	Kota Pasuruan		5 Kegiatan	Program Kotaku

22	Kurang Adanya Tempat Khusus Akses Air Bersih Bagi Balita (Stunting)	Pelabuhan Mandaran, Ngeplakrejo, Tamba'an, Panggungrejo, Mayangan dan Gadingrejo		1 Paket	Forum Anak Kelurahan Terkait
23	Perlu Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan di Wilayah Kampung KB	Kel. Gadingrejo Kel Wirogunan Kel Panggungrejo Kel. Kepel		1 Paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga berencana
24	Sistem Drainase Penunjang Sungai Ketempen di bawah Rel KA	Jl. Belitung Jl. Sumatra Jl. Lombok Jl. Jawa Sepanjang Jl. Ketempen Pertigaan Kumala Jl. Stasiun		1 Paket	Masyarakat
25	Revitalitas Drainase dengan Memperhatikan Sudut Aliran	Alun-alun Pasar Besar Depan Stasiun Jl. Niaga		1 Paket	Masyarakat
26	Peningkatan Kapasitas Reservoir Sesuai Beban SR serta Revitalitas Jaringan Perpipaan dan Mekanikal yang Tidak Layak Operasi	Kel Mayangan Kel Ngeplakrejo Kel Mandaranrejo Kel Panggungrejo		1 Paket	Masyarakat
27	Pemenuhan Sistem Katub dan Instalasi Pompa Buang	Kel Krapyak Kel Karangketug		1 Paket	Masyarakat
28	Pemenuhan Drainase dengan Memperhatikan Sudut Aliran	Mancilan, Kel Pohjentrek		1 Paket	Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Kerangka Visi Indonesia 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ke-tujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) prioritas tersebut, prioritas pembangunan nasional ke lima yaitu **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar** sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 9 Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa:

- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
- Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

2. Infrastruktur Ekonomi berupa:

- Penunjang Konektivitas Darat seperti Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru
- Kereta Api kecepatan tinggi dan Kereta Api angkutan barang
- Penunjang Konektivitas Laut seperti Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- Penunjang Konektivitas Udara seperti Bandara Baru, Jembatan Udara

3. Infrastruktur Perkotaan berupa:

- Transportasi Perkotaan
- Energi Berkelanjutan Perkotaan
- Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
- Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman
- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan terjangkau di Perkotaan

Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Infrastruktur Perkotaan

Sebagai upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, maka fokus prioritas rencana pembangunan infrastruktur ditetapkan dengan:

1. Infrastruktur pelayanan dasar
2. Terwujudnya konektivitas jalan kota

Sedangkan sasaran prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang ekonomi dan social
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

32 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi kesenjangan antar kawasan.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi

lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra. Tujuan juga harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Dengan pernyataan tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman.”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang dicapai secara nyata melalui melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kota yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran Pemerintah Kota yang selaras dengan fungsi/ bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah “Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar”.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan, ditetapkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yaitu “Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman”.

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
 - c. Pendampingan dan evaluasi PNPM
 - d. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
 - e. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- 2) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum
 - a. Pendataan dan Pemetaan daerah rawan air
 - b. Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum di daerah rawan air
 - c. Melaksanakan fasilitasi SPAM
 - d. Penyusunan peraturan pengelolaan Air Minum
- 1) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi
 - a. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
 - b. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
 - c. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan inrastruktur permukiman
 - d. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir
 - e. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase

3.3 Program dan Kegiatan

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/ kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja. Dan selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dan dikoordinasikan dengan PD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada tahun 2023 sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra PD 2021-2026, yaitu :

- a. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum;
- b. Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah;
- c. Program pengembangan permukiman;
- d. Program penyelenggaraan jalan;
- e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- f. Program pengembangan perumahan;
- g. Program kawasan permukiman;
- h. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1. Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dan Renja PD, yakni Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat yang mana terdapat dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, sehingga mengakibatkan perubahan anggaran.

Rincian program dan kegiatan yang ada merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Realisasi dari pengajuan anggaran tersebut mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/ kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Tabel 3.1
Tabel Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97.84 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	94,77 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang terbangun	100 SR	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	13
		Persentase Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh	7.21%							Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	100 SR

						91,95 %	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	85%	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan
														Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan
														Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan
														Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan	68 Orang

										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16 Laporan
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	37 Orang/bulan
																			Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan

					Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
					Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang

				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase Terpenuhi Layanan Administrasi Perkantoran					Persentase Terpenuhinya layanan administrasi Kantor	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	36 Dokumen
												Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan

					Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
					Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
					Persentase barang milik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	20 unit

					daerah yang terpelihara		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Yang Terpelihara		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
				PROGRAM PENGEMBAHAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	90 %	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	90 %	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 laporan

											Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dokumen
				15,11 %	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKI MAN					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
							Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	270 rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	270 Unit Rumah	
							Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	270 Laporan	
				36.65 %	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas	PROGRAM PENINGKATAN PRASARA	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang	19 PSU	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	

				NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	umum (PSU) perumahan yang layak			terbangun dan terpeliharaan					
										Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Memunjang Fungsi Humian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memunjang Fungsi Humian	19 Lokasi	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

41 Rencana Program, Kegiatan dan Kegiatan RKPD 2023

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja. Dan selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Adapun program/kegiatan yang telah ada di dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rincian program dan kegiatan yang ada merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Realisasi dari pengajuan anggaran tersebut mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2023 untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan program-kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Indikator kinerja utama pada RKT berisi indikator program (outcome) atau minimal indikator kegiatan (output) penting.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	Kota Pasuruan	94.77 %					
1.3.3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Panjang jaringan pipa air minum yang terbangun	Kota Pasuruan	100 SR					

	Ka bupaten/Kota								
1.3.3.2.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan								
1.3.3.2.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Karangketug, Purworejo, Tembokrejo, Kebonagung, Sekargadung, Bugul Kidul, Krampyangan	100 SR	1.685.958.900	DAU dan DAK		100 SR	2.000.000.000
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	Kota Pasuruan	91,71%					
1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Septictank Yang Terbangun	Kota Pasuruan	741 SR					
1.3.5.2.01.3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Pasuruan, Gadingrejo, Bukir, Randusari, Purworejo, Pohjentrek	741 Rumah Tangga	5.381.428.100	DAU dan DAK		741 Rumah Tangga	4.000.000.000
1.3.5.2.01.6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kota Pasuruan, Tamba'an, Panggungrejo	12 Rumah Tangga	562.926.720	DAK		12 Rumah Tangga	-
1.3.5.2.01.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	2 Kelompok	171.915.525	DAU		2 Kelompok	80.000.000

	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Semua Kelurahan						
1.3.5.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Unit	441.202.213	DAU		36 Unit	450.000.000
1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	Kota Pasuruan	91,95%					
1.3.7.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	Kota Pasuruan	85,00%					
1.3.7.2.01.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sistem Jaringan	19.801.683.200	DAU		4 Sistem Jaringan	0
1.3.7.2.01.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sistem Jaringan	3.214.297.876	DAU		4 Sistem Jaringan	0
1.3.7.2.01.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sistem jaringan	314.946.000	DAU		4 Sistem jaringan	0

1.3.7.2.01.4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 Orang	127.613.700	DAU		68 Orang	0
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
1.3.10.2.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan								
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%					
1.4.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%					
1.4.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Pangungrejo, Pekuncen	16 Laporan	40.865.500	DAU		16 Laporan	35.000.000

1.4.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	Kota Pasuruan	100%					
1.4.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	37 Orang/Bulan	4.216.961.155			37 Orang/Bulan	4.216.961.155
1.4.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	20 Laporan	93.677.800			20 Laporan	93.677.800
1.4.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%					
1.4.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	4 Laporan	188.468.000	DAU		4 Laporan	190.000.000
1.4.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen						
1.4.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	1 Paket	152.652.900	DAU		1 Paket	160.000.000
1.4.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	6 Dokumen	9.425.276	DAU		6 Dokumen	10.000.000
1.4.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	480 Orang	53.400.000	DAU		480 Orang	65.000.000

1.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100%					
1.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	1 Paket	18.832.565	DAU		1 Paket	19.000.000
1.4.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	7 Paket	185.133.400	DAU		7 Paket	190.000.000
1.4.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	2 Paket	20.090.600	DAU		2 Paket	22.000.000
1.4.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	36 Dokumen	5.320.800	DAU		36 Dokumen	6.000.000
1.4.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	6 Laporan	24.057.800	DAU		6 Laporan	25.000.000
1.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	60 Laporan	164.906.300	DAU		60 Laporan	180.000.000
1.4.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi-nya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an						
1.4.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	1 Unit	230.000.000	DAU		1 Unit	250.000.000
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	100%					

1.4.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	1 Laporan	2.500.000	DAU		1 Laporan	3.000.000
1.4.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	12 Laporan	87.598.832	DAU		12 Laporan	90.000.000
1.4.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	12 Laporan	528.095.250	DAU		12 Laporan	530.000.000
1.4.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang U rusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	100%					
1.4.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	20 Unit	303.049.985	DAU		20 Unit	330.000.000
1.4.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	13 Unit	8.085.000	DAU		13 Unit	9.000.000
1.4.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	81 unit	35.086.348	DAU		81 unit	38.000.000
1.4.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	1 Unit	215.000.000	DAU		1 Unit	250.000.000
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Tamba'an	100%					

1.4.2.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase ketercapaian kinerja sub kegiatan	Kota Pasuruan, Ponggongrejo, Tamba'an	100%					
1.4.2.2.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan, Ponggongrejo, Tamba'an	3 laporan	32.415.300	DAU		3 laporan	35.000.000
1.4.2.2.05.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan, Ponggongrejo, Tamba'an	2 Dokumen	1.461.815.964	DAU		2 Dokumen	1.470.000.000
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,11%					
1.4.3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
1.4.3.2.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
1.4.3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270 Rumah					
1.4.3.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270 Unit Rumah	4.725.000.000	DAU		270 Unit Rumah	5.250.000.000

1.4.3.2.03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270 Laporan	273.344.400	DAU		270 Laporan	280.000.000
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,65%					
1.4.5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang terbangun dan terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 PSU					
1.4.5.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	74.487.000	DAU		5 Dokumen	80.000.000
1.4.5.2.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Lokasi	5.529.261.015	DAU		19 Lokasi	6.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan RENSTRA serta RKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan sudah menampung usulan-usulan masyarakat/stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

Sebagai dokumen perencanaan PD, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sering mengalami kendala baik dari internal PD maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan konsistensi alur perencanaan mengalami perubahan, baik dari segi kegiatan serta anggaran atau pendanaan yang menyertainya. Permasalahan internal yang dihadapi berupa adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, masalah akan bertambah apabila pemangku kebijakan kurang bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait perubahan kondisi yang ada di wilayah Kota Pasuruan.

Sedangkan permasalahan eksternal muncul karena faktor-faktor luar yang terjadi diluar kendali PD, seperti adanya realisasi alokasi anggaran dari pusat dipertengahan tahun anggaran. Serta adanya kepentingan dari pihak yang bersifat bottom-up dan harus dilaksanakan dengan segera. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dapat dilakukan persiapan dan perencanaan yang lebih akurat, dimulai dari bidang atau unit kerja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan menjaga konsistensi alur perencanaan merupakan hal mendasar yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipatif dan penuh tanggungjawab.

Ke depannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 merupakan pedoman dalam memberikan arahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dalam penyusunannya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Pasuruan, 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN



DYAH ERMITASARI, ST, MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721105 199803 2 012